

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran juga dapat dikatakan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. Teori peran (Role Theory) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (Dgauzi, 2000).

Syarat peran menurut Soekanto (2012) mencakup tiga hal yaitu :

1. peran meliputi norma –norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur social masyarakat .

Menurut Adi (2012).Beberapa dimensi mengenai peran yaitu:

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat,sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
2. Peran sebagai terapi, menurut pemahaman ini yaitu sebahai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.
3. Peran sebagai suatu kebijakan , penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Pemerintah Desa

Wahjudin (2011) menyatakan bahwa desa yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki satu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Widjaja, 2002).

Pemerintah Desa keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk menunjang partisipasi masyarakat. (Widjaja, 2001).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh Karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pasal 18 tentang kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebodohan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi,2010).

Menurut Muhammad (2017) keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentuan.

Pada jurnal penelitian (Guartin dkk,2019) bahwa pemberdayaan pada prinsipnya sebuah proses dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan dalam hal ini lebih diarahkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Menurut (Friedmann,1994 dalam Noor, 2011) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dikaji menjadi 3 aspek yaitu:

1. Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat yang bisa berkembang. Pemahamannya bahwa setiap orang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang tanpa daya.

2. Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut persediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.

Menurut (Ife,2008 dalam Firmasyah,2012) bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti prinsip holism, keberlanjutan, keanekaragaman ,perkembangan organic, perkembangan yang seimbang dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

(Nasdian,2014) menyatakan bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu proses yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (the disadvantaged)”.

Menurut (Ginandjar,1996) pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Sugandi (2011) pemberdayaan merupakan upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah bahwa yang lemah bertambah lemah, oeh karena itu ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Mardikanto (2010) hakekat pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama –sama melakukan hal-hal berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok , berdasarkan hasil kajian.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
4. Memantau proses hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.

Seseorang yang mengalami pemberdayaan akan memiliki perubahan sikap secara cepat dan memiliki sikap yang lebih positif. Akan tetapi hal tersebut perlu adanya kesempatan yang harus diberikan dari masyarakat kepada penyandang cacat seperti yang disampaikan oleh Peter Coleridge sebagai berikut :

“karakteristik seseorang yang mengalami pemberdayaan akan terbukti seketika. Pemberdayaan datang dari sikap-sikap positif seperti yang disebutkan diatas. Meski tampak begitu kut, seseorang yang telah mengalami pemberdayaan tidak akan merugikan siapa pun. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk belajar memandang diri sendiri secara positif, dan sikap positif itu akan membuat orang lain disekitarnya ketularan”(Coleridge, 1997:69).

Berikut merupakan perbedaan sikap antara orang yang mengalami pemberdayaan dengan yang tidak mengalami pemberdayaan.

Table 2.1
Perbedaan sikap antara orang yang mengalami pemberdayaan dengan yang tidak mengalami pemberdayaan.

NO	Mengalami Pemberdayaan	Tidak Mengalami Pemberdayaan
1	Terbuka akan perubahan	Tertutup ,tak mau berubah
2	Tegas	Agresif
3	Proaktif	Reaktif
4	Mawas Diri	Menyalahkan orang lain
5	Mandiri	Tergantung pada orang lain
6	Berperasaan	Dikuasai emosi
7	Belajar dari kesalahan	Merasa terpukul kalau salah
8	Menghadapi segala sesuatu	Cenderung menghindar
9	Hidup di masa sekarang	Hidup di masa lalu atau masa depan
10	Realistis	Tidak realistis
11	Berfikir relative	Berfikir mutlak-mutlakan
12	Harga diri tinggi,percaya diri	Rendah diri

(Sumber : Coleridge, 1997 :69)

Adapun indikator pemberdayaan menurut (Jifaturohman, 2017 dalam Puspitasari, 2019), sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan yaitu suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan perekonomian. Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora,2004).

2. Pendampingan

Pendampingan yaitu pantauan kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan. Pendampingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini peranan seorang pekerja sering diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping (Edi,2010).

3. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah yaitu bentuk apresiasi dan bantuan dari pemimpin daerah berupa : modal, promosi,dan pelatihan untuk mensejahterakan masyarakat tunagrahita.

4. Tunagrahita

Tunagrahita yaitu istilah yang diberikan kepada individu yang memiliki kondisi kecerdasan dibawah rata-rata atau dapat dikatakan keterbelakangan mental. Artinya ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada di bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan

kekurangan dalam tingkah laku menyesuaikan diri dan semua ini berlangsung (termanifestasi) pada masa perkembangannya (Rochyadi,2012).

Istilah orang lain mental subnormal dalam beberapa referensi disebut pula dengan keterbelakangan mental, lemah ingatan, mental subnormal, tunagrahita. Semua makna ini dari istilah sana yakni menunjukkan kepada seorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal (Efendi, 2006).

Tunagrahita merupakan bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata (Somantri,2006). Mereka mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Tunagrahita yaitu fungsi dan perkembangan intelektual di bawah normal yang disertai dengan kelemahan dalam pelajaran, perkembangan sosial serta keterlambatan mencapai tingkat dewasa (Kartini,2006).

Klasifikasi Tunagrahita menurut (Somantri, 2006 dalam Latifi,2018) adalah :

1. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut dengan moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. Anak tunagrahita ringan ini juga dapat didik menjadi tenaga kerja semi-killed pekerja laundry, pertanian, peternakan, pekerja rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik (Somantri, 2006 dalam Latifi,2018).

2. Tunagrahita Sedang

Tunagrahita sedang disebut dengan imbsil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 skala Binnet, IQ 54-40 menurut skala Weschler (WISC). Anak Tunagrahita sedang mereka masih dapat menulis secara social misalnya, nama sendiri, alamat rumah,dan lain-lain. Mereka juga masih dapat dididik untuk mengurus diri sendiri, berpakaian, makan dan minun, serta dapat mengerjakan pekerjaan rumah. Anak tunagrahita sedang dalam kehidupanya sehari-hari mereka membutuhkan pengawasan yang terus menerus (Somantri, 2006 dalam Latifi,2018).

3. Tunagrahita Berat

Kelompok tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan dari antara tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ 32-20 menurut skala Binet dan IQ 39-25 menurut skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat bera (profound) memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Weschel (WISC). Tunagrahita berat memerlukan perawatan secara total bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya (Somantri, 2006 dalam Latifi,2018).

B. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan maka berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 2.2

Hasil penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Achmad Nur Huda, (Tesis 2015)	Hasil penelitian ini

	<p>Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Karangpatihan (studi kasus pada masyarakat miskin dan penderita retardasi mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.</p>	<p>menjelaskan bahwa peran kepala desa dalam membuat kebijakan secara inovatif telah mampu merubah image masyarakat mengenai desa idiot menjadi desa mandiri. Faktor penghambat kepemimpinan kepala desa adalah komunikasi , anggaran, dan periode kepemimpinan kepala desa.</p>
2	<p>Tanjung Sekar Arum, Rina Herlina Haryanti ,Program Pemberdayaan Tunagrahita melalui Kerajinan Keset di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Jurnal Wacana Publik ,Vol 1 No.3 2017 hlm 16-23)</p>	<p>hasil jurnal menjelaskan bahwa program pemberdayaan tunagrahita ini melalui tiga tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Tahapan pertama yaitu tahapan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan serta peluang-peluangnya tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tunagrahita yang sulit untuk diketahui potensinya serta tujuan dari pemberdayaan tunagrahita disini hanya fokus pada pemandirian masyarakat. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Pelatihan ini</p>

		<p>ditujukan untuk masyarakat tunagrahita yang bukan hanya memiliki keterbatasan mental tetapi ada juga yang disertai dengan bisu, tuli maupun buta. Sehingga masyarakat yang diberikan pelatihan digolongkan menjadi golongan ringan, sedang, dan berat. Tahapan yang selanjutnya adalah pemantauan hasil kegiatan. Proses pelatihan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.</p>
3	<p>Amila, Tesis (2017) Pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita melalui kelompok swadaya masyarakat rumah harapan karangpatihan bangkit (studi kasus di desa karangpatihan kecamatan Balong)</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok swadaya masyarakat rumah harapan karangpatihan bangkit adalah dengan melakukan berbagai kegiatan, masyarakat tunagrahita diberikan pelatihan, ketrampilan, dan pembinaan di Rumah Harapan. Adanya pemberdayaan memberikan hasil pada warga tunagrahita diantaranya: pertama, masyarakat memiliki</p>

		<p>sumber pendapatan. Kedua, kemampuan mobilitas. Ketiga, partisipasi dalam kehidupan social. Keempat, terpenuhinya gizi dan dapat mengurangi kondisi keturunan tunagrahita.</p>
4	<p>Citra Gaffara Tawarahmah,dkk, Peran karang taruna dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo dan implikasi terhadap ketahanan ekonomi keluarga (Jurnal Ketahanan Nasional 2017)</p>	<p>hasil jurnal menjelaskan bahwa Peran Karang Taruna sebagai fasilitator dan kordinator. Kegiatan yang selama ini telah dijalankan Karang Taruna Desa Karangpatihan mampu mengubah kebiasaan yang ada dalam masyarakat yaitu, terbukanya kesempatan pemuda untuk menyampaikan gagasan kepada forum desa, pemuda menjadi pengagas dibangunnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi warga disabilitas dan pemuda dapat mendorong warga untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan. Kedua, kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas Dusun Tanggungrejo memberi kontribusi dalam peningkatan pendapatan keluarga. Dengan adanya pemberdayaan,</p>

		<p>penyandang disabilitas yang awalnya tidak memiliki kesempatan kerja mampu diberdayakan sehingga memiliki penghasilan dari kegiatan tersebut. Peningkatan pendapatan penyandang disabilitas berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan pemberian orang lain.</p>
--	--	--

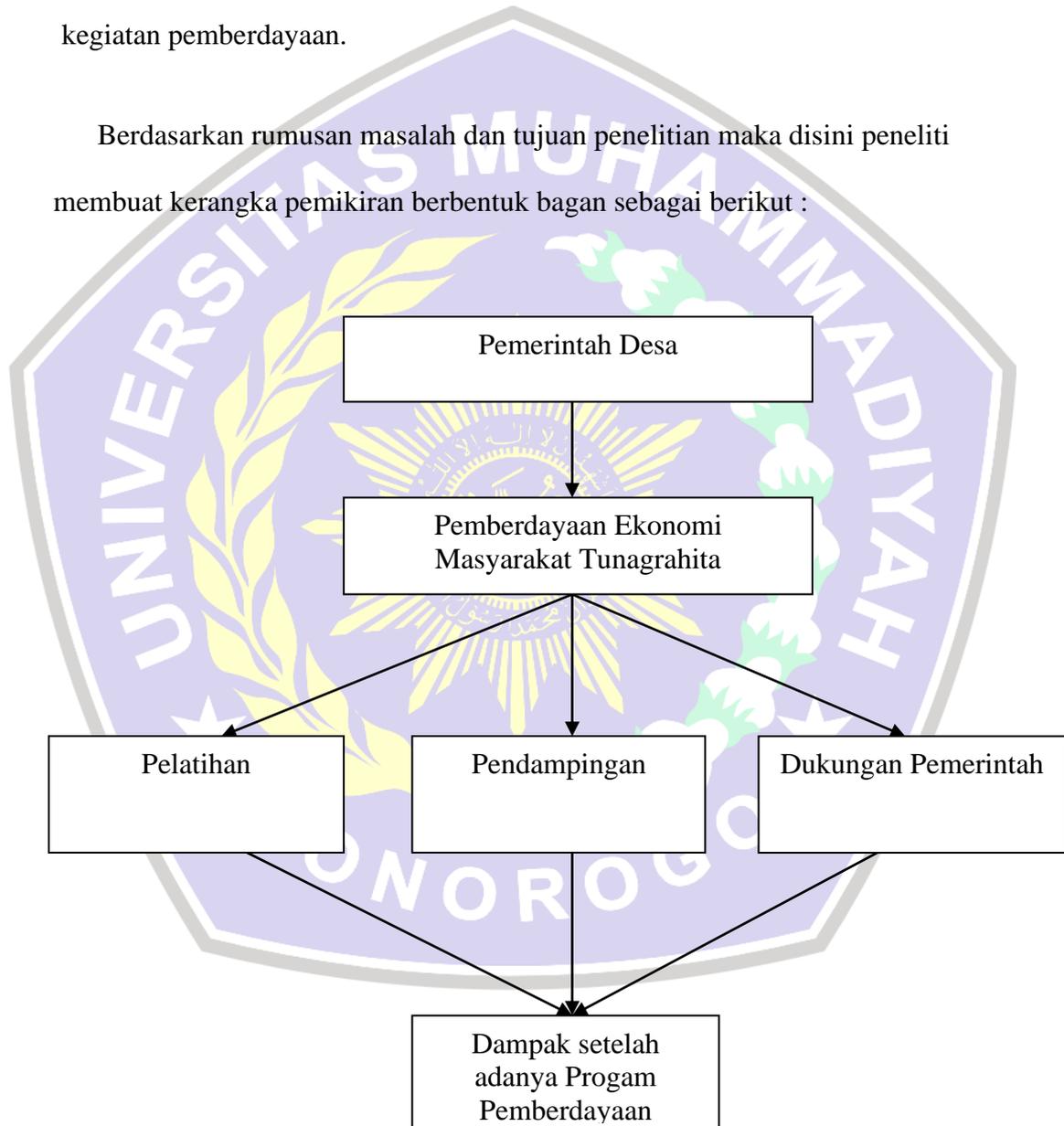
C. Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono,2011) Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berrbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting. Maka dengan kerangka berpikir yaitu sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sebuah pemahan yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran dengan bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Di dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang ada di Desa Karangpatiha, Kecamatan Balong. Pemerintah desa , kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Widjaja ,2002). Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan Desa itu sendiri, seperti dengan adanya program pemberdayaan ini

membuat masyarakatnya menjadi lebih produktif dan mempunyai nilai tambah untuk penghasilan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut (Jifaturohman, 2017 dalam Puspitasari, 2019), agar kegiatan pemberdayaan berlangsung harus adanya proses pelatihan, pendampingan serta dukungan dari pemerintah. Dari tiga tersebut merupakan bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka disini peneliti membuat kerangka pemikiran berbentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran